

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi secara harfiah, berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang artinya suatu penilaian atau penafsiran (Dharma 2000:220). Akar katanya *Value* yang artinya nilai. Jadi istilah evaluasi menunjukkan pada suatu Tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam perancangan pelaksanaannya serta hasilnya. Menurut Mehrens & Lelman (1978), evaluasi adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk alternatif-alternatif keputusan.

Evaluasi merupakan penilaian terhadap data-data yang terkumpulkan. Selain itu, evaluasi juga dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan. Dalam menganalisis kebijakan, evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai dan manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai hal ini, karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi, Dunn (2000).

Anderson (1987:7) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan, sebagai suatu kegiatan fungsional, adalah suatu kebijakan itu sendiri. Pengambilan-pengambilan kebijakan dan administrator-administrator senantiasa membuat penilaian terhadap keberhasilan terhadap dampak dari kebijakan-kebijakan khusus, program-program dan proyek-proyek yang dilakukan itu. Kifer (1995) mendefinisikan evaluasi sebagai penyelidikan untuk menentukan nilai atau manfaat (worth) suatu program, produk, prosedur atau proyek. Selanjutnya menurut Alkin (1985) evaluasi adalah suatu aktivitas sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan program atau proyek yang dievaluasi.

Sedangkan Stufflebeam (2007) mendefinisikan evaluasi sebagai proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Pengumpulan data dan laporan yang diperoleh melalui evaluasi dibuat untuk menambah efektifitas dari pelaksanaan program. Pada program evaluasi seorang evaluator harus mampu aktif untuk berkomunikasi dengan stakeholder.

Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi untuk keperluan jangka Panjang dan untuk kepentingan keberlanjutan (*sustainable*) suatu program, evaluasi sangat diperlukan. Dengan evaluasi, kebijakan-kebijakan ke depan akan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berikut ini diberikan beberapa argument perlunya evaluasi:

1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya.
2. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat tingkat efektifitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.

3. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah.
4. Menunjukkan pada berkepentingan manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, para stakeholders, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program.
5. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.

Mehren dan Lehmann (1978:5) menjelaskan evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Pengertian yang dikemukakan keduanya menunjukkan bahwa evaluasi itu merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data dan berdasarkan informasi atau data tersebut dibuat suatu keputusan.

Stufflebeam dan Shinkfield (2007) menyatakan bahwa: *evaluation is a systematic investigation of some object's value*. Evaluasi adalah suatu investigasi, penelitian, penyelidikan, atau pemeriksaan yang sistematis terhadap nilai suatu objek. Secara operasional Stufflebeam dan Shinkfield memaparkan evaluasi adalah proses merencanakan, memperoleh, melaporkan, dan menggunakan informasi deskriptif dan mempertimbangkan beberapa manfaat objek, nilai signifikansi dan kejujuran dalam rangka memandu pengambilan keputusan, akuntabilitas, dukungan, menyebarkan praktek-praktek yang efektif serta meningkatkan pemahaman tentang fenomena-fenomena yang terlibat. Sudjana (2008) memaknai evaluasi sebagai kegiatan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data untuk masukan dalam pengambilan keputusan mengenai

program yang sedang dan/atau telah dilaksanakan. Produk evaluasi adalah tersusunnya nilai-nilai (values) seperti bermanfaat atau tidak bermanfaat, baik atau buruk, berhasil atau tidak berhasil, diperluas atau dibatasi, dilanjutkan atau dihentikan, dan sebagainya, mengenai program yang sedang atau telah dilaksanakan.

Setelah memahami pengertian evaluasi secara umum maupun menurut para ahli, maka harus juga di perhatikan bahwa evaluasi ini sendiri memiliki dua jenis yang berbeda. Yakni evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif adalah suatu penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama dilaksanakannya suatu kegiatan atau program kerja. Umumnya, waktu pelaksanaan evaluasi ini dilaksanakan secara rutin perbulan atau per tahun. Evaluasi Formatif juga dapat meliputi evaluasi yang dilakukan sebelum program berjalan, atau sedang dalam pelaksanaan, atau setelah program selesai dan dapat diteliti hasil dan dampaknya. Evaluasi Formatif dapat digunakan sesuai dengan keperluan informasi hasil penilaian. Manfaatnya, memberikan umpan balik kepada manajer program terkait kemajuan hasil yang telah dicapai serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi selama berlangsungnya suatu kegiatan atau program kerja tersebut. Menurut Setiven dalam Purwanto dkk (1999) evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki program selama program tersebut sedang berjalan, caranya dengan menyediakan balikan tentang seberapa bagus program tersebut sedang berjalan caranya dengan menyediakan balikan tentang seberapa bagus program tersebut telah berlangsung. Melalui evaluasi formatif ini dapat dideteksi adanya ketidak efisienan sehingga segera dilakukan revisi. Selain itu evaluasi memberikan data yang relative cepat (*short term data*). Hasil evaluasi formatif harus diberikan pada saat yang tepat agar efektif.

Sedangkan Evaluasi sumatif adalah suatu penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama dilaksanakannya suatu kegiatan atau program kerja, secara keseluruhan dari awal sampai akhir kegiatan. Waktu pelaksanaan hasil evaluasi ini sendiri diadakan pada saat akhir kegiatan sesuai dengan jangka waktu yang

ditetapkan oleh suatu kegiatan atau program kerja. Untuk program kerja atau kegiatan yang memiliki jangka waktu selama enam bulan, maka evaluasi sumatif ini juga dilaksanakan menjelang akhir bulan tersebut. Untuk evaluasi yang menilai dampak kegiatan atau program kerja tersebut, dapat dilaksanakan setelah proyek berakhir dan diperhitungkan dampaknya sudah terlihat nyata. Evaluasi sumatif bertujuan mengukur efektivitas keseluruhan program. Mengukur dan menilai hasil akhir dari akhir program ini bertujuan untuk membuat keputusan tentang kelangsungan program tersebut, yaitu diteruskan atau dihentikan (Poerwanto dkk, 1999:21).

Dari pengertian evaluasi secara umum hingga pengertian evaluasi menurut para ahli, pengertian evaluasi ini sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses sistematis dalam membuat perencanaan pelaksanaan, pemantauan, menentukan atau menyediakan informasi terhadap program kerja atau kegiatan yang dilakukan. Dan untuk mengetahui sejauh mana sebuah program telah mencapai tujuannya melalui beberapa kegiatan atau aktifitas pengambilan data secara sistematis, melakukan penilaian suatu program dan memberikan keputusan.

2.1.1. Evaluasi Program

Menurut Wirawan (2011:17), program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk waktu yang tidak terbatas, semua program perlu dievaluasi untuk menentukan apakah pelayan atau intervensinya telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program yang ditentukan. Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*) dan evaluasi akibat (*impact evaluation*).

Menurut Stufflebeam (2007) evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai

dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara bervariasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan.

Ada empat hal penting yang ditekankan dalam evaluasi program seperti yang dikemukakan oleh Rossi dalam Totok Mardikanto & Poerwoko Soebianto (2013:269), yaitu:

- a. Siapa (kelompok) penerima manfaat program, dimana lokasinya, dan bagaimana spesifikasi kelompok penerima manfaat program tersebut;
- b. Apa metode yang terbaik yang akan diterapkan, demi tercapainya tujuan yang diinginkan;
- c. Apakah program tersebut benar-benar konsisten dengan tujuan yang diinginkan;
- d. Seberapa jauh peluang keberhasilan program yang akan dilaksanakan

Sedangkan disisi yang lain, adapun indicator keberhasilan dapat dilihat tingkat keberhasilan suatu program adalah:

- a. Program mendapat dukungan dari berbagai pihak baik bersifat material maupun imaterial.
- b. Terlaksananya program lapangan yaitu program yang telah direncanakan dapat diimplementasikan dengan baik;
- c. Program tepat sasaran artinya program digunakan oleh obyek yang menjadi sasaran program;
- d. Tercapainya tujuan program yaitu akhir dari rencana program yang telah dirumuskan.

Berasarkan definisi dari beberapa pendapat dapat dikatakan evaluasi program merupakan sebuah pengujian melalui pengukuran objektif dan analisis sistematis, terhadap cara-cara dan sejauh mana program itu mencapai tujuan yang direncanakan. Mulai proses pengumpulan data atau informasi yang ilmiah dimana hasilnya dapat digunakan untuk rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk perbaikan-perbaikan program yang akan datang dalam menentukan alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan.

2.1.2. Tujuan Evaluasi Program

Menurut Endang Mulyatiningsih (2011: 114-115), evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program yang sama ditempat lain.
- b. Mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Dilihat dari tujuannya, yaitu ingin mengetahui kondisi sesuatu, maka evaluasi program dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk penelitian evaluatif. Oleh karena itu, dalam evaluasi program, pelaksana berfikir dan menentukan langkah bagaimana melaksanakan penelitian.

Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009: 7), terdapat perbedaan yang mencolok antara penelitian dan evaluasi program adalah sebagai berikut:

- a. Dalam kegiatan penelitian, peneliti ingin mengetahui gambaran tentang sesuatu kemudian hasilnya dideskripsikan, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanaan ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu sebagai hasil pelaksanaan program, setelah data yang terkumpul dibandingkan dengan criteria atau standar tertentu
- b. Dalam kegiatan penelitian, peneliti dituntut oleh rumusan masalah karena ingin mengetahui jawaban dari penelitiannya, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanaan ingin mengetahui tingkat ketercapaian tujuan program, dan apabila tujuan belum tercapai sebagaimana ditentukan, pelaksanaan ingin mengetahui letak kekurangan itu dan apa sebabnya.

Weiss (1972) menyatakan tujuan dilakukannya evaluasi program sebagai berikut:

1. Menunjuk pada penggunaan metode penelitian.

2. Menekankan pada hasil suatu program.
3. Penggunaan kriteria untuk menilai.
4. Kontribusi terhadap pengambilan keputusan dan perbaikan program di masa mendatang.

Menurut Kirkpatrick (1998) urgensi diperlukannya evaluasi program adalah:

1. Untuk menunjukkan eksistensi dari dana yang dikeluarkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran program yang dilakukan.
2. Untuk memutuskan apakah kegiatan yang dilakukan akan diteruskan akan dihentikan. Untuk mengumpulkan informasi bagaimana cara untuk mengembangkan program di masa mendatang.

Tujuan evaluasi menurut Scriven mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif yaitu evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan (program, orang, produk dan sebagainya) sedangkan fungsi sumatif yaitu evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Dengan kata lain evaluasi bertujuan membantu pengembangan, implementasi.

Mutrofin (2010:157) menyatakan tujuan evaluasi program adalah untuk mendapatkan informasi yang mungkin berguna padansaat memilih diantara berbagai kebijakan atau program alternatif untuk mencapai tujuansosial. Selanjutnya menurut Tayibnapis (2000:59) tujuan evaluasi dapat bermacam-macam, antara lain sebagai pekerjaan rutin atau tanggung jawab rutin untuk membantu pekerjaan manajer dan karyawan dengan tujuan yang lebih banyak, dan informasi yang lebih lengkap dari yang sudah ada atau memberikan informasi untuk tim Pembina atau penasehat, untuk klien, untuk dewan direktur atau pemberi dana atau sponsor.

Sukmadinata (2006:121) menjelaskan tujuan evaluasi program adalah:

1. Membantu perencann untuk pelaksanaan program.

2. Membantu dalam penentuan keputusan penyempurnaan atau perubahan program.
3. Membantu dalam penentuan keputusan keberlanjutan atau penghentian perubahan program.
4. Menemukan fakta-fakta dukungan dan penolakan terhadap program.
5. Memberikan sumbangan dalam pemahaman proses psikologis, social, politik dalam pelaksanaan program serta factor-faktor yang mempengaruhi program.

Lebih jelasnya lagi Purwanto dan Suparman (1999) memaparkan tujuan evaluasi adalah:

1. Mengkomunikasikan program kepada masyarakat. Laporan hasil atau informasi dari evaluasi program yang dilakukan dapat memberikan pemahaman kepada khalayak tentang program atau tentang inerja/performa. Oleh karena itu, mengkomunikasikan hasil evaluasi program yang lebih lengkap dari sekedar angka-angka kepada masyarakat memiliki keuntungan dan kebaikan terhadap program yang dievaluasi.
2. Menyediakan informasi bagi pembuat keputusan. Informasi yang dihasilkan dari evaluasi program akan berguna bagi setiap tahapan dari manajemen program mulai sejak perencanaan, pelaksanaan ataupun ketika akan mengulangi dan melanjutkan program. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar bagi pembuatan keputusan, sehingga keputusan tersebut valid dibandingkan keputusan yang hanya berdasarkan kepada intuisi saja. Pembuat keputusan biasanya memerlukan informasi yang akurat agar dapat memutuskan sesuatu secara tepat dan informasi akurat tersebut antara lain dapat diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis. Penyediaan informasi hasil evaluasi bagi pembuat keputusan tersebut tidak terbatas pada keputusan oleh pejabat pemegang otoritas dalam institusi itu saja, tetapi bisa meliputi pembuatan keputusan dalam berbagai level oleh pihak-pihak lain yang terkait.

3. Menyempurnakan program yang ada. Suatu evaluasi program yang dilaksanakan dengan baik dapat membantu upaya-upaya dalam rangka penyempurnaan jalannya program sehingga lebih efektif. Dengan instrumen yang ada, hasil yang dicapai dapat diukur dan diagnosis. Berbagai kelemahan dan kendala yang mungkin timbul dapat ditemukan dan dikenali, kemudian dianalisis serta ditentukan alternatif pemecahannya yang paling tepat. Komponen-komponen dalam sistem yang memiliki kekurangan dan kelemahan dapat dipelajari dan dicari solusinya. Berdasarkan hasil evaluasi akan dapat diperoleh informasi tentang dampak dari berbagai aspek program dan berhasil juga teridentifikasi berbagai faktor yang diperlukan atau perlu penyempurnaan.
4. Meningkatkan partisipasi dan pertumbuhan. Dengan adanya informasi hasil evaluasi atas suatu program, maka masyarakat akan lebih terpenggil untuk berpartisipasi dan ikut mendukung upaya-upaya peningkatan dan penyempurnaan program. Hasil evaluasi program yang dimasyarakatkan akan menggugah kepedulian masyarakat terhadap program, menarik perhatiannya dan akhirnya menumbuhkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) terhadap program tersebut. Apabila hal ini telah terbina maka akan tercipta suatu kontrol eksternal yang ikut memacu dan mengawasi pertumbuhan kualitas dari program yang bersangkutan

Dari pemaparan yang diperoleh dari beberapa pakar yang telah dijabarkan diatas maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan obyektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak/hasil yang dicapai, efisiensi, serta pemanfaatan hasil evaluasi dapat digunakan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Selain itu, juga dipergunakan untuk kepentingan penyusunan program berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang terkait dengan program.

Oleh sebab itu bahwa evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi program dimanfaatkan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau melakukan pengambilan keputusan berikutnya.

2.1.3. Karakteristik Evaluasi Program

Karakteristik evaluasi program sangatlah berbeda dengan penelitian pada umumnya. Evaluasi program memiliki karakteristik yang unik dan tersendiri sebagai ciri khasnya, menurut Arikunto dan Jabar (2009) terdapat 8 (delapan) karakteristik evaluasi program sebagaimana dipaparkan sebagai berikut:

1. Proses kegiatan evaluasi program tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi penelitian pada umumnya.
2. Dalam melaksanakan evaluasi program, peneliti harus berpikir secara sistematis yaitu memandang program yang diteliti sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau unsur yang saling berkaitan satu sama lain dalam menunjang keberhasilan kinerja dari objek yang dievaluasi.
3. Agar dapat mengetahui secara rinci kondisi dari objek yang dievaluasi, perlu adanya identifikasi komponen yang berkedudukan sebagai factor penentu bagi keberhasilan program.
4. Menggunakan standar, kriteria atau tolak ukur sebagai perbandingan dalam menentukan kondisi nyata dari data yang diperoleh dan untuk mengambil kesimpulan
5. Kesimpulan atau hasil evaluasi program digunakan sebagai masukan atau rekomendasi bagi sebuah kebijakan atau rencana program yang telah ditentukan. Dengan kata lain, dalam melakukan kegiatan evaluasi program, peneliti harus berkiblat pada tujuan program kegiatan sebagai standar, kriteria atau tolak ukur.
6. Agar informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata secara rinci untuk mengetahui bagian mana dari program yang belum

terlaksana, maka perlu ada identifikasi komponen yang dilanjutkan dengan identifikasi subkomponen, sampai pada indikator dari program yang dievaluasi.

7. Standar, kriteria atau tolak ukur diterapkan pada indikator, yaitu bagian yang paling kecil dari program agar dapat dengan cermat diketahui letak kelemahan dari proses kegiatan
8. Dari hasil evaluasi program harus dapat disusun sebuah rekomendasi secara rinci dan akurat sehingga dapat ditentukan tindak lanjut secara tepat.

2.1.4. Model Evaluasi Program

Ada banyak model yang bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu program. Model-model evaluasi yang satu dengan yang lainnya memang tampak bervariasi, akan tetapi maksud dan tujuannya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi. Selanjutnya informasi yang terkumpul dapat diberikan kepada pengambil keputusan agar dapat dengan tepat menentukan tindak lanjut tentang program yang sudah dievaluasi.

Eko Putro Widoyoko menjelaskan bahwa “model evaluasi merupakan desain evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli evaluasi, yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatnya atau tahap evaluasinya”. Untuk memilih berbagai model evaluasi program kiranya pendekatan eclectic dapat dijadikan rujukan. Pendekatan eclectic yaitu memilih berbagai model dari beberapa pilihan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan situasi dan sesuai dengan kondisi setempat (Tayibnapi, 2000:7).

Menurut Kaufman dan Thomas yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin Abdul Jabar (2009: 40), membedakan model evaluasi menjadi delapan, yaitu:

- a. Goal Oriented Evaluation Model, dikembangkan oleh Tyler.
- b. Goal Free Evaluation Model, dikembangkan oleh Scriven.

- c. *Formatif Summatif Evaluation Model*, dikembangkan oleh Michael Scriven.
- d. *Countenance Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake.
- e. *Responsive Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake.
- f. *CSE-UCLA Evaluation Model*, menekankan pada “kapan” evaluasi dilakukan.
- g. *CIPP Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stufflebeam.
- h. *Discrepancy Model*, dikembangkan oleh Provus.

Pemilihan model evaluasi yang akan digunakan tergantung pada tujuan evaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi program pembelajaran keterampilan memasak digunakan pendekatan *system*. Pendekatan *system* adalah pendekatan yang dilaksanakan dalam mencakup seluruh proses program RPTRA dalam menciptakan kota layak anak di Kelurahan Sungai Bambu yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan *CIPP Evaluation Model*.

2.1.5. *CIPP Evaluation Model*

Stufflebeam yang mengembangkan model evaluasi ini, model *CIPP* yang merupakan sebuah singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu *Context, Input, Process, and Product*. Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan *CIPP* tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model *CIPP* adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem.

Model ini sangatlah unik yaitu pada setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat pengambil keputusan (*decision*) yang menyangkut perencanaan dan operasional sebuah program. Keunggulan model *CIPP* memberikan suatu format evaluasi yang komprehensif/menyeluruh pada setiap tahapan evaluasi yaitu tahap konteks, masukan, proses, dan produk. Masing-masing dimensi tersebut dengan makna sebagai berikut:

1. *Context* : Evaluasi konteks dimaksudkan untuk menilai kebutuhan, masalah, asset dan peluang guna membantu pembuat kebijakan

menetapkan tujuan dan prioritas, serta membantu kelompok pengguna lainnya untuk mengetahui tujuan, peluang dan hasilnya. Evaluasi konteks juga memberikan gambaran, rincian terhadap lingkungan, serta menilai kebutuhan dan tujuan secara lebih terarah. Evaluasi konteks mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi obyektif yang dilaksanakan. Hal tersebut berisi tentang kekuatan dan kelemahan obyek tertentu yang akan atau sedang berjalan.

Konteks program dalam program RPTRA dalam menciptakan kota layak anak di Kelurahan sungai Bambu yang dievaluasi dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Latar Belakang Program RPTRA
 - b. Analisis kebutuhan program RPTRA
 - c. Tujuan Program RPTRA
2. *Input* : Kegiatan evaluasi masukan (input evaluation) bertujuan untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber, alternatif apa yang akan diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Informasi dan data yang terkumpul dapat digunakan untuk menentukan sumber dan strategi dalam keterbatasan yang ada.
- Dalam evaluasi ini, masukan (*input*) dalam program RPTRA dalam menciptakan kota layak anak di Kelurahan sungai Bambu yang dievaluasi dalam penelitian ini, yaitu:
- a. Sumber daya manusia
 - b. Sarana atau peralatan yang mendukung
 - c. Dana atau anggaran
 - d. Berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan
3. *Process* : Kegiatan evaluasi ini juga bertujuan untuk membantu melaksanakan keputusan serta menilai dan mendeteksi implementasi dari rencana yang telah ditetapkan guna membantu para pelaksana dalam menjalankan kegiatan. Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik

pelaksanaan program. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki. Evaluasi proses menentukan kegiatan yang akan dilakukan dengan keterlibatan berbagai pihak yang ada dalam program tersebut. Semua unsur yang ada mempunyai peranan yang penting dalam keberhasilan program tersebut.

Program RPTRA dalam menciptakan kota layak anak di Kelurahan sungai Bambu. Dalam evaluasi ini, proses (*process*) program yang akan di evaluasi yaitu :

- a. Perencanaan program RPTRA
 - b. Pelaksanaan program RPTRA
 - c. Monitoring dan evaluasi RPTRA
4. *Product* : Kegiatan ini bertujuan untuk membantu keputusan selanjutnya. Dan untuk mengetahui hasil apa yang telah dicapai dan apa yang dilakukan setelah program berjalan. Evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan data yang dihasilkan akan sangat menentukan apakah program diteruskan, dimodifikasi atau dihentikan. Evaluasi produk sebagai hasil dari suatu proses diharapkan sesuai dengan rencana program yang telah disusun melalui proses. Apabila produk ini tidak sesuai dengan proses yang telah dilakukan maka produk tersebut dikatakan berhasil. Sebaliknya bila produk itu belum sesuai dengan proses maka harus dicari tahu dimana letak kesalahan tersebut.

Dalam penelitian ini dilakukan evaluasi terhadap produk program yaitu hasil dari program RPTRA dalam menciptakan kota layak anak di Kelurahan sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara berjalan efektifitas atau tidak

Model CIPP ini bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: karakteristik peserta didik dan lingkungan, tujuan program dan peralatan yang digunakan,

prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Dalam hal ini Stufflebeam melihat tujuan evaluasi sebagai:

- a. Penetapan dan penyediaan informasi yang bermanfaat untuk menilai keputusan alternatif.
- b. Membantu audience untuk menilai dan mengembangkan manfaat program pendidikan atau obyek.
- c. Membantu pengembangan kebijakan dan program.

Aspek yang dievaluasi dan prosedur pelaksanaan evaluasi model CIPP menurut Stufflebeam dalam Oliva (1992) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Aspek Dan Prosedur Pelaksanaan Evaluasi

Aspek	Context	Input	Process	Output
Objek (sasaran)	Mengidentifikasi operasional <i>context</i> , mengidentifikasi dan memperkirakan kebutuhan dan mendiagnosa masalah, memprediksi kebutuhan dan peluang	Mengidentifikasi dan memperkirakan kapabilitas sistem, strategi <i>input</i> yang sekarang tersedia, dan mendesain untuk implementasi strategi	Mengidentifikasi dan memperkirakan di dalam proses tentang kerusakan di dalam desain prosedur atau implementasi, menyediakan informasi sebelum program diputuskan dan memperbaiki dokumen <i>even procedural</i> dan aktivitas	Menghubungkan informasi <i>outcomes</i> dengan obyek dan informasi <i>context</i> , <i>input</i> , dan <i>process</i>
Metode	Mendiskripsikan <i>context</i> , membandingkan dengan yang sebenarnya dan mengawasi <i>input</i> dan <i>output</i> , membandingkan kemungkinan dan ketidakmungkinan sistem kerja, dan menganalisa penyebab ketidakmungkinan dan ketidaksesuaian kenyataan dengan tujuab (harapan)	Mendiskripsikan dan menganalisis SDM dan sumber daya material yang tersedia, solusi, strategis dan desain prosedur untuk relevansi, kemungkinan kegiatan yang apat dilaksanakan, dan kebutuhan ekonomi dalam rangkaian kegiatan	Memonitoring setiap aktivitas yang berpotensi terdapat tantangan secara procedural dan memberikan tanda untuk antisipasi, untuk memperoleh informasi yang spesifikasi untuk memutuskan suatu program, dan mendeskripsikan proses yang aktual	Mendefinisikan operasional dan mengukur kriteria asosiasi dengan obyektif dan membandingkan hasil pengukuran dengan standar sebelum dilakukan antisipasi, dan menginterpretasi <i>outcomes</i> berdasarkan dokumen informasi <i>context</i> , <i>input</i> , dan <i>process</i>

Aspek	Context	Input	Process	Output
Hubungan pengambilan keputusan dengan proses perubahan	Memutuskan dalam hal menyajikan perangkat, tujuan asosiasi, dengan mendiskusikan kebutuhan dan peluang dan sasaran asosiasi untuk perubahan perencanaan kebutuhan	Memilih SDM sebagai pendukung, solusi strategis, dan desain <i>prosedural</i> untuk perubahan struktur kerja (aktivitas)	Untuk implementasi dan memperbaiki desain program dan prosedur untuk keefktifan proses kontrol	Untuk memutuskan dalam kegiatan secara kontinu, menghentikan (mengakhiri), modifikasi mengatur Kembali focus perubahan aktivitas dengan tahapan materi yang lain dalam proses perubahan untuk mengatur Kembali aktivitas perubahan

Empat aspek dalam model evaluasi CIPP yaitu *context, input, process, dan output* membantu pengambil keputusan untuk menjawab empat pertanyaan dasar mengenai:

- 1) Apa yang harus dilakukan (*What should we do?*) mengumpulkan dan menganalisa *need assessment* data untuk menentukan tujuan, prioritas dan sasaran.
- 2) Bagaimana kita melaksanakannya (*How should we do it?*) sumber daya dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan dan mungkin meliputi identifikasi program eksternal dan material dalam mengumpulkan informasi.
- 3) Apakah dikerjakan sesuai rencana (*Are we doing it as planned?*) Ini menyediakan informasi bagi pengambil keputusan tentang seberapa baik program diterapkan. Dengan secara terus-menerus monitoring program, pengambil keputusan mempelajari seberapa baik pelaksanaan telah sesuai petunjuk dan rencana, konflik yang timbul, dukungan staff dan moral, kekuatan dan kelemahan material, dan permasalahan penganggaran.
- 4) Apakah berhasil (*Did it work?*); Dengan mengukur *outcome* dan membandingkannya pada hasil yang diharapkan, pengambil-keputusan menjadi lebih mampu memutuskan jika program harus dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan sama sekali.

2.2. Efektifitas

2.2.1. Konsep Efektifitas

Pada kamus bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya) dapat diartikan membawa hasil, berhasil guna serta dapat pula berarti mulai berlaku. Selanjutnya bahasa Inggris, kata efektif yaitu *effective* yang berarti berhasil satu sesuatu yang dilakukan itu berhasil dengan baik. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang

diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Robbins (2010) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang.

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy efektivitas adalah sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan" (Effendy, 2003:14).

Gibson dkk (1994:31) memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu (1) seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Mahmudi (2005:92) berpendapat bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang bernilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

The Lian Gie dalam Halim, 2004:167, mengatakan efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya.

Menurut Wijaya (2000:259) berpendapat efektivitas merupakan suatu program pengembangan manajemen yang pada dasarnya dilakukan dengan membandingkan sasaran dan tujuan program yang dapat dicapai.

Menurut Sondang P. Siagian pengertian efektivitas adalah:

Pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Sementara menurut Abdurahmat “efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya”. Chester I. Barnard memberi defenisi efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran menunjukkan tingkat efektivitas”.

Steers (2008:55) berpendapat bahwa efektivitas merupakan tolak ukur keberhasilan dari tujuan akhir yang hendak dicapai. Dengan demikian, efektivitas merupakan pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan pekerjaan tepat pada waktunya. Menurut Sedarmayanti (2009:109) dalam bukunya “*transformasi pelayanan publik*” mendefenisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau gangguan diantara pelaksananya.

Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Konsep efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli organisasi dan manajemen memiliki makna yang berbeda, tergantung pada kerangka acuan yang dipergunakan. Secara nyata, Stonner (1982) menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam

pencapaian tujuan-tujuan organisasi, dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan

suatu organisasi.

Sedangkan Miller (1977:292) mengemukakan bahwa:

“Effectiveness be define as the degree to which a social system achieve is goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency is mainly concerned with goal attainments.” (Efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem social mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan)

Selanjutnya dikatakan oleh Georgopualos dan Tannebaum dalam Etzioni (1969:82):

“...Organization effectiveness as the extent to which an organization as a social system, given certain resources and mean, fulfill it’s objective without incapacitating it’s means and resources and without placing strain upon it’s members. (...Efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan system sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu di antara anggota -anggotanya)

Jadi, secara umum ada pandangan bahwa efektivitas dimaksudkan atau dapat didefinisikan dalam batas-batas tingkat pencapaian tujuan organisasi. Hall (1974:96) mengartikan bahwa dengan tingkat sejauh mana suatu organisasi merealisasikan tujuannya, semua konsep tersebut hanya menunjukkan pada pencapaian tujuan organisasi, sedangkan bagaimana cara mencapainya tidak dibahas. Yang membahas bagaimana mencapai tingkat efektivitas adalah Argris dalam Silis (1968:312) yang mengatakan:

“Organizational effectiveness then is balanced organization optimal emphasis upon achieving object solving competence and human energy utilization” (Efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia)

Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26) antara lain:

1. Efektivitas Individu

Efektivitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

2. Efektivitas Kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari

semua anggota kelompoknya

3. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Sumaryadi (2005:105) berpendapat dalam bukunya "efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah" bahwa: Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional.

Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.

Disimpulkan bahwa konsep tingkat efektivitas organisasi menunjuk pada tingkat jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada. Ini berarti bahwa pembicaraan mengenai efektivitas organisasi menyangkut dua aspek, yaitu :

1. Tujuan organisasi, dan
2. Pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut.

2.2.2. Pendekatan Efektifitas

Untuk menilai apakah sebuah organisasi itu efektif atau tidak, terdapat banyak cara atau pendapat, antara lain yang mengatakan bahwa suatu organisasi efektif atau tidak, secara keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan organisasi itu tercapai dengan baik atau tidak. Teori yang paling sederhana ialah teori yang berpendapat bahwa efektivitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara keseluruhan, pandangan yang juga penting adalah teori yang menghubungkan tingkat kepuasan para anggotanya. Menurut teori ini sesuatu organisasi dikatakan efektif bila para anggotanya merasa puas. Akhir-akhir ini berkembang suatu teori atau pandangan yang lebih komprehensif dan paling umum dipergunakan dalam membahas persoalan efektivitas organisasi adalah kriteria flexibility, productivity dan satisfaction.

Pandangan beberapa ahli mengenai pendekatan yang dapat digunakan dalam mengukur keefektifan organisasi antara:

1. Gibson, Donnely dan Ivancevich (1997:27-29) mengemukakan bahwa pendekatan untuk mengukur efektivitas adalah pendekatan tujuan dan pendekatan sistem.

2. Robbins (2010:58) membagi kedalam empat pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu: pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituensi-strategis, dan pendekatan nilai-nilai bersaing.

2.2.3. Indikator Efektifitas

Beberapa faktor kritis dalam mengukur keberhasilan suatu organisasi tergantung pada beberapa indikator. Beberapa kriteria tersebut diantaranya tidak mudah untuk diukur secara kuantitatif, misalnya kepuasan, motivasi, dan moral. Kaplan dan Norton (1992, 1993, 1996) menemukan suatu model yang memberikan alternatif untuk perbaikan dalam pengukuran efektivitas organisasi atau kinerja organisasi yang dikenal dengan balanced scorecard yang menggunakan pengukuran internal maupun eksternal, kuantitatif maupun kualitatif, yang dibagi dalam 4 perspektif, yaitu: (1) keuangan, (2) pelanggan, (3) proses internal, dan (4) inovasi.

Perspektif tersebut di atas, dikembangkan oleh Smith (1997) kedalam beberapa indikator, yaitu:

1. Keuangan, diukur dengan indikator: aliran kas, pertumbuhan penjualan, dan pangsa pasar;
2. Pelanggan, diukur dengan indikator: penjualan produk baru, ketepatan waktu pengiriman, kualitas pelayanan;
3. Proses internal, dengan indikator: pemeringkatan teknologi, produktivitas, biaya per unit, dan cycle time;
4. Inovasi, dengan indikator: waktu yang digunakan untuk mengembangkan suatu produk, waktu yang digunakan untuk merespon kebutuhan pasar, fokus terhadap produk baru.

Sementara itu, Sharma dalam Tangkilisan (2005:64) memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi antara lain:

1. Produktivitas organisasi atau output
2. Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan didalam dan diluar organisasi.

3. Tidak adanya ketegangan didalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik di antara bagian-bagian organisasi.

Steers dalam bukunya mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi yaitu:

1. Produktivitas
2. Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas
3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan ber laba
5. Pencarian sumber daya

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya Efektivitas Organisasi mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pertahapan, baik dalam arti pertahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pertahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Sementara itu Sondang P. Siagian mengemukakan ukuran untuk mencapai tujuan yang efektif ada beberapa kriteria, yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

2.2.4. Efektifitas Program

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan

membandingkan tujuan program dengan *output* program (Ditjen Binlantas Depnaker, 1983, dalam Setiawan, 1998).

Sementara itu pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut dinyatakan oleh Kerkpatrick yang dikutip oleh Cascio (1995) bahwa evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi peserta terhadap program yang diikuti.

Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program
Yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program
Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program

dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

3. Pencapaian Tujuan program

Yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pemantuan program

Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh (Cambel, 1989:121)

Efektivitas program dapat diukur dengan melihat sejauhmana pencapaian tujuan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan pendapat masyarakat penerima bantuan program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program.

2.3. Pengertian Program

Kata program berasal dari bahasa Inggris "*programe*" yang artinya acara atau rencana. Secara konseptual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, program diartikan sebagai rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu kelompok tertentu

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "program" artinya rancangan mengenai asas serta usaha yang dilakukan. Program dapat dikatakan sebagai rancangan yang didalamnya mencakup sejumlah usaha yang ingin dilakukan walaupun tidak semuanya bisa direalisasikan. Sebuah program besar dapat didefinisikan sebagai rencana komprehensif yang meliputi penggunaan

macam-macam sumber daya untuk masa yang akan datang dalam sebuah pola yang terintegrasi dan menetapkan suatu urutan masing-masing tindakan tersebut dalam rangka usaha mencapai sasaran yang ditetapkan KBBI (2009:2).

Arikunto (2014:4) menambahkan bahwa program merupakan suatu sistem, dimana rangkaian kegiatan dilaksanakantidak hanya satu kali namun berkesinambungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program merupakan sederetan kegiatan yang dilaksanakan lebih dari satu kali namun berkesinambungan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Nawawi (2007:174) mengemukakan pendapatnya bahwa program dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintahataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan yang telahditetapkan. Program-program disusun dengan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan. Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Untuk lebih memahami mengenai pengertian program, berikut ini akan dikemukakan definisi oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Pariata Westra dkk. (1989:236) mengatakan bahwa:
 “Program adalah rumusan yang membuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya”

Sondang P. Siagian (2006:1:17)
 “Perumusan program kerja merupakan perincian daripada suatu rencana. Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional program kerja itu berwujud berbagai macam bentuk dan kegiatan”

Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu

seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan.

Suatu program yang baik menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984:181) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin
4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut
5. Hubungan dalam kegiatan lain usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya.
6. Berbagai upaya dalam bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut. Dengan demikian, dalam menentukan suatu program harus

dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari masyarakat.

Dengan beberapa pendapat tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa program adalah serangkaian tindakan atau aktivitas untuk dapat melaksanakan sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan.

2.4. Program Kota Layak Anak

Berdasarkan Keppres nomor 36 tahun 1990 yang merupakan hasil ratifikasi dari Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak (KHA) (1989) menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.

UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 – 18 tahun. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menjadi dasar pertimbangan penentuan batas usia tersebut mengacu pada ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Jika dicermati dari pengertian-pengertian diatas, maka secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 18 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 18 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial serta pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 18 tahun.

Kota Layak Anak adalah kota yang di dalamnya telah diramu semangat untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya dalam proses pembangunan kota yang berkelanjutan. Kota yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan (fisik non fisik) serta diskriminasi.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak 5 September 1990. Hal ini merupakan komitmen Indonesia dalam menghormati dan memenuhi hak anak. Komitmen ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (2), dan operasionalnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk mentransformasikan hak anak ke dalam proses pembangunan, pemerintah mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak.

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. Dalam Kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.

Kota Layak Anak dan atau Kota Ramah Anak kadang-kadang kedua istilah ini dipakai dalam arti yang sama oleh beberapa ahli dan pejabat dalam menjelaskan pentingnya percepatan implementasi Konvensi Hak Anak ke dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.

Untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan empat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Empat peraturan dimaksud adalah :

1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

2.5. Konsep Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) merupakan ruang publik berupa ruang terbuka hijau ramah anak yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung perkembangan anak, kenyamanan orangtua, serta tempat berinteraksi seluruh warga dari berbagai kalangan. (Jakarta.go.id)

Dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi perlu dibangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai upaya mendukung Jakarta menjadi Kota Layak Anak (KLA). KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak-hak manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

2.5.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi RPTRA

RPTRA dibangun oleh Pemerintah Daerah di wilayah dan dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat untuk kepentingan publik yang multifungsi. RPTRA dibangun untuk tugas :

1. Menyediakan ruang terbuka untuk memenuhi hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

2. Menyediakan prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak.
3. Menyediakan prasarana dan sarana kota sebagai Kota Layak Anak.
4. Menyediakan prasarana dan sarana untuk pelaksanaan kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK.
5. Meningkatkan pencapaian ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah dan Meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan social warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan kader PKK.

Dapat dilihat bahwa tugas dari RPTRA tersebut adalah menyediakan sebuah ruang terbuka yang menyediakan sarana dan prasarana yang tentunya ramah anak akan tetapi dapat dimanfaatkan oleh orang dewasa dan menjadi sarana untuk warga sekitar untuk berbagai kegiatan yang utamanya adalah sarana untuk bersosialisasi antar tetangga.

Sedangkan fungsi dari RPTRA adalah sebagai:

1. Taman terbuka publik.
2. Wahana permainan dan tumbuh kembang anak.
3. Prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak.
4. Bagian dari prasarana dan sarana Kota Layak Anak.
5. Ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah.
6. Prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan kader PKK.
7. Usaha meningkatkan pendapatan keluarga.
8. Pusat informasi dan konsultasi keluarga.
9. Halaman keluarga yang asri, teratur, indah, dan nyaman; dan Sistem

2.5.2. Layanan dan Kegiatan

Pada RPTRA dilaksanakan layanan yang ditujukan untuk anak, masyarakat, dan kebencanaan. Dalam hal pelayanan ini, RPTRA tidak hanya dibangun untuk anak saja namun RPTRA difungsikan sebagai suatu ruang terbuka publik yang multifungsi sehingga baik dari golongan anak-anak,

masyarakat dewasa hingga asyarakan lanjut usia pun dapat ikut serta memanfaatkan RPTRA. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan yang untuk anak, berikut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di RPTRA:

1. Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD)
2. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
3. Perpustakaan anak
4. Tempat berolahraga
5. Tempat bermain
6. Kegiatan kreatif anak
7. Memberikan pelatihan dan mengembangkan minat bakat anak (Latihan nari, latihan nyanyi, melukis)
8. Jam belajar dan mengaji malam
9. PIK (Pusat Informasi Keluarga)

2.6. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan dimulai pada era awal tahun 1900-an di amerika ketika banyak bermunculan perusahaan-perusahaan besar di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada saat itu banyak perusahaan-perusahaan adidaya ini yang menyalahgunakan kekuasaannya baik kepada para pekerjanya maupun kepada masyarakat luas, sehingga banyak menimbulkan emosi di masyarakat dan pada akhirnya melakukan aksi protes kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karenanya, pemerintah Amerika kemudian mengeluarkan sebuah kebijakan yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan dimana diwajibkan untuk mengeluarkan suatu keputusan yang dapat mengembangkan sosial-ekonomi masyarakat. Kebijakan ini pun terus berevolusi sampai sekarang yang dikenal dengan CSR atau *Community Social Responsibility*.

Menurut Muhammad Hamim (2020) *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah sebuah komitmen dari suatu bisnis atau perusahaan untuk dapat berperilaku secara etis dan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkesinambngan.

Widjaja & Yeremia, (2008) CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (stake-holders) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (sustainability) perusahaan tersebut. Pengertian tersebut sama dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, konsep CSR dapat dipahami dalam Pasal 2 bahwa menjadi ke-wajiban bagi BUMN baik Perum maupun Persero untuk melaksanakannya.

Menurut Kotler & Nance, (2005) mendefinisikannya sebagai komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan praktik bisnis dan pemberian kontribusi sumber daya korporasi.

Winosobo (2007) suatu komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat setempat atau masyarakat secara luas, serta meningkatkan taraf hidup bagi karyawan maupun keluarganya.

Fraderick (1960) mempunyai pendapat yang sedikit berbeda dengan yang lainnya dimana menurutnya, pengertian CSR menurut Fraderick adalah suatu asas yang dapat menjelaskan bahwa perusahaan harus memberikan tanggung jawab penuh atas akibat-akibat yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan itu berada.

Suharto (2009) *Strengthening Corporate Social Responsibility* bahwa pengertian CSR adalah sebuah proses bisnis yang tidak saja meningkatkan perusahaan secara finansial, akan tetapi juga membangun tingkat sosial-ekonomi daerah tersebut secara berkesinambungan.

Tujuan pelaksanaan program CSR semakin meluas dan mendalam ke beberapa aspek diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan pada sektor lingkungan dan masyarakat pada umumnya,
2. Membangun dan mempertahankan *brand value* dan *brand image* perusahaan,
3. Membangun dan mengembangkan SDM yang berkualitas dan berpotensi,
4. Mengurangi resiko bisnis perusahaan dan tindakan korupsi di dalam perusahaan,
5. Menciptakan dan membangun hubungan yang berkelanjutan kepada seluruh pihak baik individu maupun komunitas ataupun pemegang kekuasaan (*stakeholder*) lainnya di lingkungan perusahaan itu berada,
6. Meningkatkan produktivitas dan motivasi pekerja perusahaan dan kesejahteraan keluarganya,
7. Membuka akses terhadap pasar dan juga sumber daya yang dibutuhkan perusahaan lebih luas.

Menurut Bungaran Antonius (2017:96) manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi perusahaan secara umum dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya perusahaan dapat mengimplementasikan melalui tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), lingkungan (*planet*).

Menurut Imam Syairozi (2019:15) selain mendapat manfaat bagi perusahaan, dengan menerapkan aktivitas CSR dapat mendatangkan manfaat yang positif bagi masyarakat dan pemerintah, yaitu:

- a. Manfaat bagi Masyarakat dapat meningkatkan berbagai sektor seperti diadakannya Pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat, sektor ketenaga kerjaan seperti meningkatkan pelatihan atau training untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja masyarakat luas.
- b. Manfaat bagi Pemerintah Aktivitas dari CSR sendiri berhubungan dengan masalah yang ada di berbagai daerah seperti halnya masalah Pendidikan, kurangnya akses kesehatan bagi masyarakat

sekitar, dan pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan orang banyak. Dengan adanya kerjasama dari adanya kebijakan pemerintah dengan perusahaan atau organisasi yang menerapkan CSR, banyak masyarakat yang terbantu akan adanya pelaksanaan CSR di sekitra mereka.

Berbagai manfaat yang ada, perusahaan kini akan mudah mendapatkan brand image mereka. Kebijakan pemerintah yang ada juga mempermudah akses perusahaan dalam melakukan aktivitas CSR-nya. Beberapa manfaat CSR bagi perusahaan, yaitu:

1. Mendorong lebih banyak informasi dalam pengambilan keputusan berdasarkan peningkatan pemahaman terhadap ekspektasi masyarakat, peluang jika kita melakukan tanggung jawab sosial (termasuk manajemen risiko hukum yang lebih baik) dan risiko jika tidak bertanggung jawab secara social.
2. Meningkatkan praktek pengelolaan risiko dari organisasi.
3. Meningkatkan reputasi organisasi dan menumbuhkan kepercayaan publik yang lebih besar.
4. Meningkatkan daya saing organisasi.
5. Meningkatkan hubungan organisasi dengan para stakeholders.
6. Meningkatkan loyalitas dan semangat kerja karyawan. Meningkatkan keselamatan dan kesehatan baik karyawan laki-laki maupun perempuan dan berdampak positif pada kemampuan organisasi untuk merekrut, memotivasi dan mempertahankan karyawan.
7. Memperoleh penghematan terkait dengan peningkatan produktivitas dan efesiensi sumber daya, konsumsi air dan energi yang lebih rendah, mengurangi limbah, dan meningkatkan ketersediaan bahan baku.
8. Meningkatkan keandalan dan keadilan transaksi melalui keterlibatan politik yang bertanggung jawab, persaingan yang adil, dan tidak adanya korupsi.

9. Mencegah atau mengurangi potensi konflik dengan konsumen tentang produk dan jasa.
10. Memberikan kontribusi terhadap kelangsungan jangka Panjang organisasi dengan mempromosikan keberlanjutan sumber daya alam dan jasa lingkungan.
11. Kontribusi kepada masyarakat dan untuk memperkuat masyarakat umum dan lembaga.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat diterapkannya CSR pada perusahaan yaitu tidak hanya dirasakan oleh perusahaan saja namun dirasakan juga oleh pemerintah, masyarakat dan lingkungan. RPTRA Sungai Bambu di bangun melalui CSR, TMMIN, JAYA ANCOL. RPTRA Sungai Bambu di resmikan pada 13 Mei 2015 oleh Gubernur DKI Jakarta Bpk. Basuki Tjahja Purnama.

2.7. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan dan menghindari kesalahpahaman terhadap teori yang digunakan dalam penelitian ini, berikut konsep yang akan dioperasikan dalam penelitian ini:

Table 2.2
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Kefektivitas Pelaksanaan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Dalam Menciptakan Kota Layak Anak Di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara dengan menggunakan analisis evaluasi CIPP model	<i>1. Context</i>	a. Latar Belakang Program RPTRA b. Analisis kebutuhan program RPTRA c. Tujuan Program RPTRA
	<i>2. Input</i>	a. Sumber daya manusia b. Sarana atau peralatan yang mendukung c. Dana atau anggaran d. Berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan
	<i>3. Process</i>	a. Perencanaan program

		RPTRA b. Pelaksanaan program RPTRA c. Monitoring dan evaluasi RPTRA
	4. <i>Product</i>	Hasil dari program RPTRA dalam menciptakan kota layak anak di Kelurahan sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara berjalan efektifitas atau tidak

Sumber: Pengukuran Efektivitas dengan CIPP *evaluation Model* (Stufflebeam).

2.8. Kerangka Pemikir

Kerangka pikir merupakan alur berfikir peneliti dalam penelitian, untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut:

Permasalahan yang dialami anak semakin hari semakin memiliki kompleksitas dan banyak yang belum dapat terselesaikan. Beberapa permasalahan anak yang berkembang diantara lain: anak terlantar, anak terkena gizi buruk, pekerja terburuk anak, anak putus sekolah, anak yang dilacurkan, kekerasan dan kejahatan seksual anak, anak jalanan sehingga anak-anak pengguna narkoba.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyatakan Jakarta merupakan kota yang paling tinggi tingkat kekerasan terhadap anak (www.tempo.com 2015). Banyak 50ublic yang menyebabkan permasalahan ini saling berkelinda, mulai karena 50ublic ekonomi, sosial, dan hukum. Menurut data jumlah kasus anak yang ditangani oleh P2TP2A DKI Jakarta mencapai sekitaran 1.947 pada tahun 2020.

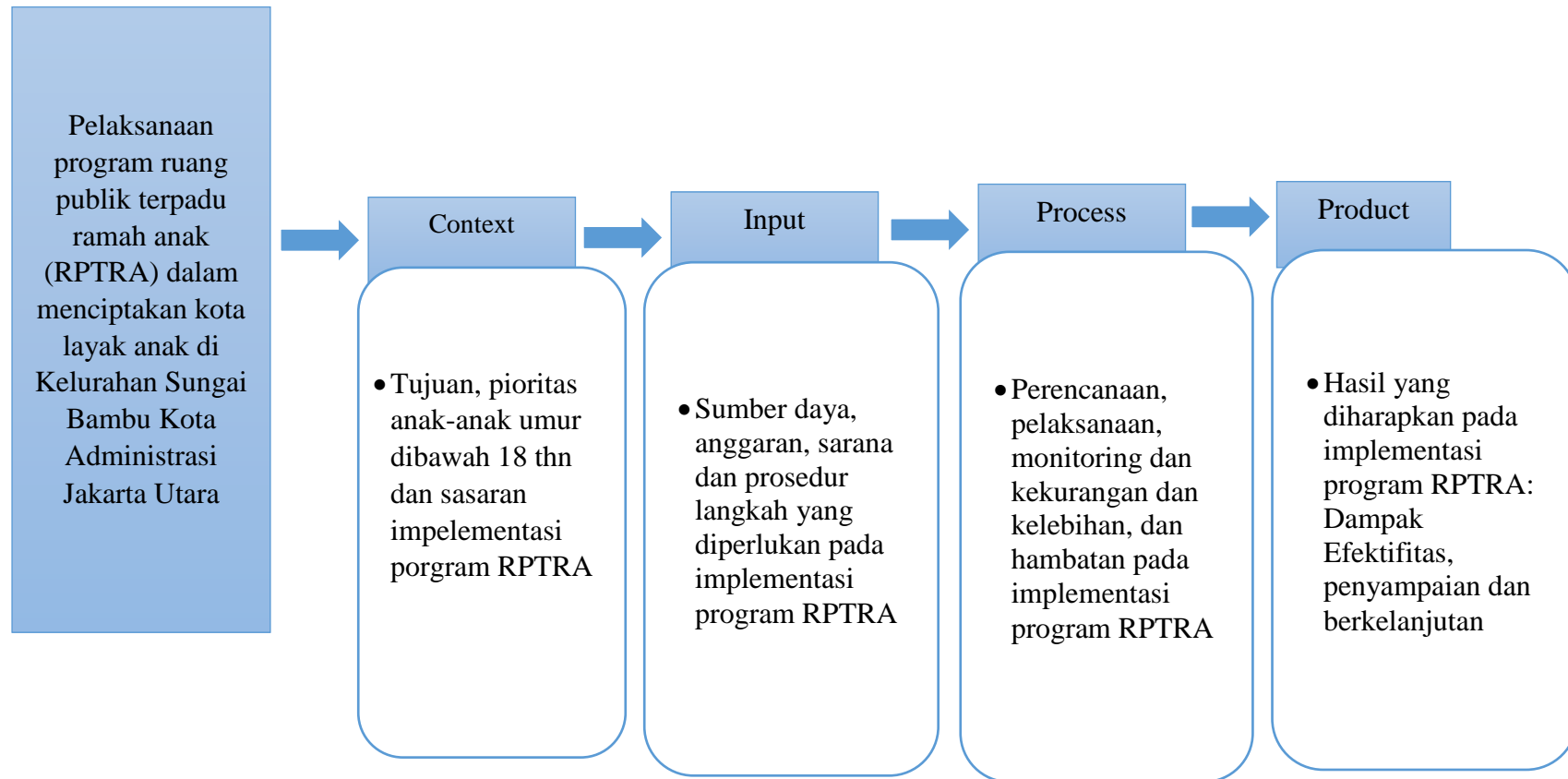
Pemerintah pun menggulirkan kebijakan Kota Layak anak (KLA) sebagai salah satu solusi dalam memberikan perlindungan dan pengembangan potensi anak sesuai dengan aspek legalitas hak anak yang mendasarinya. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai program pengembangan dari kebijakan Kota Layak Anak menjadi strategi penting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

dengan mengintegrasikan seluruh komitmen dan potensi sumber daya para pihak baik dari Pemerintah, masyarakat maupun dari pihak dunia usaha melalui sistem perencanaan yang komprehensif, menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk fasilitas fisik dan non fisik secara terpadu. Seluruh kebijakan dan langkah strategis ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hak-hak anak.

Untuk melihat keefektifan pelaksanaan program ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) dalam menciptakan kota layak anak di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara. Dapat dilihat dari analisis CIPP *Evaluation* model sebagai berikut:

Menurut ahli Stufflebeam CIPP singkatan dari :

1. *Context*
2. *Input*
3. *Process, and*
4. *Product.*



Gambar 2.1. Model Evaluasi CIPP

2.9. Peneliti Terdahulu

Di dalam melakukan penelitian terhadap Keefektifitas Pelaksanaan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Dalam Menciptakan Kota Layak Anak Di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara, perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang sebelumnya pernah dilakukan sebagai bahan pertimbangan maka penulis mencantumkan bebrapa referensi dalam penulisan jurnal yang terdapat dibawah ini.

Adapun Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu Yang Memebahas Mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Antara Lain :

No	Judul Penelitian	Nama Penulis dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Teori yang Dipakai	Hasil Penelitian
1.	Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar	Rizcah Amelia (2015)	pendekatan deskriptif kualitatif dan di dukung dengan data sekunder. Dengan menggunakan observasi langsung dan wawancara dan pada tahap akhir dengan menarik kesimpulan	1. Sasaran program 2. Sosialisasi program 3. Pencapaian tujuan program 4. Pemantauan program (Budiani 2007:53)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum cukup efektifnya program penanganan anak jalanan di dinas sosial kota Makassar, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Sosial kota Makassar dalam menangani anak jalanan. Salah satunya masalah sosialisasi kepada masyarakat tentang program penanganan anak jalanan. Beberapa factor pendukung yang ada adalah Tersedianya Regulasi (Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan) sebagai dasar hukum dalam meminimalisir jumlah anak jalanan dengan baik, Tersedianya sumber daya yang memadai untuk membina anak jalanan di Kota Makassar, dan anggaran yang memadai. Sedangkan untuk faktor pengahambat yaitu ada Modernisasi, Industrialisasi, Urbanisasi, kemiskinan, dan kondisi sosial.

No	Judul Penelitian	Nama Penulis dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Teori yang Dipakai	Hasil Penelitian
2.	Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Guna Mewujudkan Keluarga Kecil Mandiri Di Kelurahan Labukkang Kota Parepare	Rusma Ayu R*, Ramlan, Ayu Dwi Putri Rusman (2020)	Metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif	1. Pemahaman Program 2. Tepat Sasaran 3. Tepat Waktu 4. Tercapainya Tujuan. 5. Perubahan Nyata (Sutrisno,2007)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas program Kampung KB guna mewujudkan keluarga kecil mandiri di Kelurahan Labbukang Kota Parepare ditemukan bahwa (1) Pemahaman program Kampung KB belum efektif, (2) Ketepatan sasaran program Kampung KB efektif, (3) Ketepatan waktu pelaksanaan program Kampung KB efektif, (4) pencapaian tujuan program Kampung KB belum efektif, dan (5) perubahan nyata sudah efektif
3.	Evaluasi Pelaksanaan Program Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Direktorat Pembinaan SMK (Studi Kasus di Universitas Sebelas Maret)	Fuat Iskandar (2012)	Pendekatan Kuantitatif Metode Deskriptif	Danial Stufflebeam dkk, (1991)	Hasil penelitian pada komponen konteks menunjukan adanya relevansi dan hubungan yang kuat antara program pendampingan dengan tujuan dari stakeholder yang terlibat yaitu pihak Direktorat Pembinaan SMK, perguruan tinggi pelaksana dan sekolah kejuruan, pada komponen <i>input</i> institusi pelaksana merupakan perguruan tinggi yang memiliki program studi yang dibutuhkan di sekolah kejuruan serta mampu menyediakan peserta dengan program studi yang sesuai dengan program keahlian di sekolah kejuruan yang menjadi sasaran, pada komponen proses menunjukan adanya <i>living cost</i> peserta yang kurang mencukupi serta waktu pelaksanaan yang kurang optimal dikarenakan kurang sesuai dengan tahun ajaran sekolah, dan dari komponen <i>product</i> menunjukan bahwa semua peserta telah memberikan

No	Judul Penelitian	Nama Penulis dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Teori yang Dipakai	Hasil Penelitian
					manfaat bagi sekolah dalam pelaksanaan program pembelajaran di sekolah baik aspek <i>teaching</i> maupun <i>non-teaching</i>
4.	Efektivitas Pelaksanaan Program <i>Mappadeceng</i> Di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng	Cindy Vatika Sari (2021)	metode kualitatif dengan Teknik Analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan	Budiani dalam Khadafi dan Mutiarin (2017) 1. Ketepatan Sasaran Program 2. Sosialisasi Program 3. Pencapaian Tujuan Program 4. Pemantauan Program	Efektetifitas pelaksanaan program <i>mappadeceng</i> d Dinas Sosial Kabupaten Soppeng belum efektif sesuai dengan rencana, terutama dalam segi sosialisai program yang belum maksimal hal ini dikarenakan sosialisasi masyarakat dan penyampaian informasinya tidak menyeluruh. Namun beberapa indicator yang sudah tercapai yaitu ketepatan sasaran program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program yang telah tercapai sesuai rencana. Diharapkan kedepannya pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Soppeng lebih mengoptimalkan programnya dari segala aspek demi tercapai visi misi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat
5.	Efektivitas Pelaksanaan Program Generasi Berencana Dalam Meningkatkan Kesehatan	Dwi Wiliantining Pyas dan Lena Satlita,(2017)	Pendekatan Kualitatif Metode Deskriptif	Milles dan Huberman (Sugiyono, 2011:246)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Generasi Berencana (GenRe) di Kota Yogyakarta belum efektif dilihat dari lima indikator: (1) Kebijakan belum efektif dalam mengatasi permasalahan remaja. (2) Pelaksana cukup efektif dilihat dari pembagian tugas dan kewenangan meskipun memiliki keterbatasan sumberdaya manusia, (3) Target belum efektif karena target yang diintervensi belum siap mendukung Program GenRe, (4) Lingkungan kebijakan sudah efektif namun lingkungan eksternal belum efektif, dan (5) Proses belum efektif karena remaja dan keluarga yang
No	Judul Penelitian	Nama Penulis dan	Metode Penelitian	Teori yang	Hasil Penelitian

		Tahun Penelitian		Dipakai	
	Reproduksi Remaja Di Kota Yogyakarta				mempunyai remaja belum memahami substansi Program GenRe. Faktor pendukungnya yaitu kemudian dari komunikasi dan adanya pelatihan konseling. Beberapa penghambat antara lain rendahnya partisipasi masyarakat, adanya penyimpangan moral, dan keterbatasan waktu.
6.	Evaluasi Implementasi Kebijakan <i>Teaching Factory</i> dengan model evaluasi CIPP di SMK Negeri DKI Jakarta	Iwan Supriyantoko, Akbar Jaya, Vidyatama Kurnia, dan Putri Ghanim Septia Habiba (2020)	Pendekatan kualitatif metode diskriptif	Stufflebeam (1965)	Hasil evaluasi implementasi program kebijakan <i>Teaching Factory</i> di SMK Negeri DKI Jakarta dengan model CIPP mendapatkan kriteria sangat sesuai dengan rata-rata persentase 89 % dan perlu dilakukan penyesuaian di beberapa sekolah seperti guru memiliki kemampuan yang sesuai pada bidangnya dalam menjalankan <i>Teaching Factory</i> , struktur organisasi <i>Teaching Factory</i> yang diresmikan dengan dokumen pengesahan dan produk yang dapat bersaing dengan dunia industri. Supaya tujuan <i>Teaching Factory</i> dapat berjalan sehingga menumbuhkan jiwa <i>enterpreneurship</i> pada siswa selain mempersiapkan menjadi pekerja dan meneruskan kuliah
7	Perlinungan anak di Malaysia Melalui Prundang-Undangan Dan Kebijakan	Azizah Mohd Nadhilah A. Kadir (2012)	Pendekatan Kualitatif dan metode diskriptif	Analisis tentang undang-undang dan kebijakan yang tersedia memadai untuk menopang perlindungan anak di Malaysia melalui Foster	Pengasuhan, perhatian dan pengawasan merupakan salah satu sarana pengasuhan dan perlindungan anak, yang hanya dapat diperoleh dalam lingkungan keluarga. Salah satu cara untuk mewujudkan lingkungan keluarga adalah melalui Pengasuhan dimana seorang anak yang membutuhkan pengasuhan dan perlindungan akan ditempatkan bersama keluarga secara permanen atau sementara atau sampai mereka mampu menghidupi dirinya sendiri. Asuhan asuh

No	Judul Penelitian	Nama Penulis dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Teori yang Dipakai	Hasil Penelitian
				<p>Care. National Child Policy dan National Child Protection Policy (NCPP) (Abdul Jalil, S, 2009). Kebijakan Anak Nasional (KKN) adalah kebijakan tentang hak-hak anak atas kelangsungan hidup, perlindungan, kebijakan Perlindungan Anak Nasional adalah untuk memastikan bahwa setiap anak dilindungi dari penelantaran, pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi. Kebijakan peratran perlindungan anak sejalan</p>	<p>dumumnya berarti “pengasuhan formal dan informal anak-anak di luar rumah keluarga biologis mereka sendiri ketika orang tua mereka tidak mampu, tidak mau, atau dilarang merawat mereka Dalam semua kasus pengasuhan anak, orang tua kandung atau angkat anak, atau wali sah lainnya, untuk sementara menyerahkan hak asuh anak secara sah. Di bawah hukum Malaysia, tidak ada definisi asuh, namun, UndangUndang Anak 2001 (CA 2001) mendefinisikan 'orang tua asuh' sebagai orang yang mengasuh anak, tetapi bukan orang tua atau kerabat dari anak tersebut. (UU Anak 2001; s.2). Di sisi lain, berdasarkan praktik Departemen Kesejahteraan Sosial (SWD) di Malaysia, pengasuhan asuh telah didefinisikan sebagai penempatan seorang anak dalam pengasuhan, perwalian, dan pengawasan orang tua asuh berdasarkan pasal 30(1)(e) dari CA 2001. (Kassim, N.; 2011) Di Malaysia, ketentuan penempatan pengasuhan anak secara tegas diatur di bawah CA 2001. Namun demikian tidak ada lain dalam undang-undang yang mengatur prosedur atau peraturan yang berkaitan dengan sistem pengasuhan di Malaysia. Ketentuan terbatas dalam CA 2001 hanya mengatur penempatan anak yang membutuhkan pengasuhan dan perlindungan di panti asuhan dan tidak disebutkan secara rinci mengenai proses persetujuan orang tua asuh atau prosedur pengasuhan. Sedangkan untuk undang-undang lainnya mengatur tentang lembaga asuh, seperti Panti</p>

No	Judul Penelitian	Nama Penulis dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Teori yang Dipakai	Asuhan atau panti Hasil Penelitian
				dengan CRC dan CA 2001(Dasar Kanak-kanak Negara, nd).	asuhan oleh LSM. Ada beberapa aturan dan kebijakan yang harus diikuti oleh lembaga dalam memberikan pengasuhan dan perlindungan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan dan perlindungan sehingga terjamin keselamatan dan kesejahteraannya. Demikian, karena undang undang tersebut diam tentang prosedur pembinaan, itu didasarkan pada praktik SWD itu sendiri. Oleh karena itu, SWD memainkan peran penting dalam sistem asuh di Malaysia.
8	Kebijakan dan Praktik Kurikulum Anak Usia Dini di Singapura: Kasus Glokalisasi	Weipeng Yang, Hui Li, dan Lynn Ang (2021)	Pendekatan kualitatif, metode diskriptif	kurikulum itu sebagai praktik budaya mencerminkan nilai-nilai dan harapan masyarakat yang akan menentukan masa depan generasi muda melalui desain dan implementasinya (Yang, 2018; Ang, 2014).	Di Singapura, awal kebijakan masa kanak-kanak sangat dipengaruhi oleh ideologi Barat, sementara para praktisi masih menghadapi realitas sosial budaya lokal seperti budaya manajemen yang hierarkis, jadwal, sumber daya yang terbatas, stres guru, dan harapan orang tua yang tinggi. evolusi sektor anak usia dini Singapura, serta pengaruh ekologis yang mengarah ke sistem kurikulum hibrida, yaitu budaya dan sejarah. hibrida, Maka keluarlah gagasan 3CAPs” ysitu, praktik yang sesuai secara budaya, kontekstual, dan individu anak untuk memahami dan menerapkan kurikulum anak usia dini (Li & Chen, 2017; Yang & Li, 2018). Seperti yang disarankan oleh Ng et al. (2020), guru PAUD harus dilengkapi dengan strategi kunci untuk mempromosikan kualitas instruksional. Selain itu, gurupenelitian yang diprakarsai dapat digunakan sebagai pendekatan yang responsif secara budaya untuk anak usia dini. Inovasi

					kurikulum dan peningkatan kualitas (Yang et al., 2020).
No	Judul Penelitian	Nama Penulis dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Teori yang Dipakai	Hasil Penelitian
					Terakhir, bagaimana digital teknologi dapat digunakan untuk mempromosikan pembelajaran dan pengembangan anak usia dini harus aktif agenda masa depan perbaikan kebijakan dan praktik (Mah et al., 2020). Singapura terletak di Selat Malaka, salah satu wilayah geografis terpenting persimpangan yang menghubungkan dua dunia: Timur versus Barat. Singapura telah menjaga keamanan lintas selat tersebut serta komunikasi lintas budaya antara dua dunia. Dan Singapura sendiri mau tidak mau telah dipengaruhi oleh dua dunia dan mereka budaya perwakilan. Dalam prosesnya, benturan dan peleburan budaya (Li & Chen, 2017) telah terjadi secara bertahap dan tidak dapat dihindari. menggambarkan situasi saat ini kebijakan dan praktik kurikulum anak usia dini di Singapura, telah memberikan gambaran tentang bagaimana budaya Timur dan Barat telah berinteraksi, dipertukarkan, dan terjalin menjadi sebuah keunikan “budaya singapura”, yang layak untuk dieksplorasi lebih empiris di masa depan
9	Perkembangan Kebijakan Pendidikan Pra-Sekolah di Singapura: Fokus pada Reformasi	Tan Ching Ting (2007)	Pendekatan Kuliitatif	George Edward III, (1980)	Pemerintah Singapura telah memberikan perhatian yang meningkat pada pendidikan pra-sekolah dalam enam tahun terakhir. MOE telah menempatkan struktur dan sumber daya untuk perbaikan sistemik di sektor taman kanak-kanak, khususnya dalam desain kurikulum taman kanak-kanak dan kualitas kepala

	Kunci Pendidikan				sekolah dan guru taman kanak-kanak. Selain langkah-langkah sistemik, MOE juga telah memulai langkah-langkah intervensi aktif untuk membantu anak-anak
No	Judul Penelitian	Nama Penulis dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Teori yang Dipakai	Hasil Penelitian
	Taman Kanak-Kanak				TK yang berjuang dengan bahasa Inggris dan mereka yang tidak menghadiri pra-sekolah. Perkembangan kebijakan dan inisiatif baru dalam pendidikan pra-sekolah di Singapura selama bertahun-tahun telah memfasilitasi arah yang positif menuju pencapaian penyediaan pra-sekolah yang lebih berkualitas. Ke depan, Kemendikbud akan terus mengkaji bagaimana kualitas pendidikan pra-sekolah secara keseluruhan dapat lebih ditingkatkan, terutama di bidang kapasitas dan pelatihan guru, sumber daya kurikulum, dan penjaminan mutu. Perhatian yang lebih besar juga akan difokuskan untuk memastikan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah dapat mengakses pendidikan pra-sekolah berkualitas tinggi. Hasil Perkembangan kebijakan tersebut telah menghasilkan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek standar mutu Pendidikan pra-sekolah di Singapura.
10	Evaluasi Program Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Dalam Rangka	Nurseha 2013	Metode Diskriptif Kualitatif	Evaluasi Donald Kickpatrick 1959 : 1. <i>Reaction (reaksi)</i> 2. <i>Learning (pembelajaran)</i>	Tanggapam peserta diklat terhadap tingkat kepuaaan pesert terkait penyelenggaraan pelatihan dapat disimpulkan bahwa kepuasan peserta terhap aspek sarana dan prasaranan secara keseluruhan sudah cukup baik, namun belum optimal dan belum lengkap terkait layanan secretariat secara secara keseluruhan

	Peningkatan Kualitas Aparatur			3. <i>Behavior</i> (prilaku) 4. <i>Results</i> (hasil)	dianggap baik namun dari segi jumlah petugas khusus <i>directing class</i> masih kurang sehingga perlu penambahan pegawai. Penyelenggaraan diklat perlu mengikuti diklat teknisi seperti TOC dan MOT agar pengelolaan diklat optimal dan dikelola secara professional.
No	Judul Penelitian	Nama Penulis dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Teori yang Dipakai	Hasil Penelitian
	Kabupaten Berau				Keberhasilan pembelajaran peserta dinilai baik, dari segi penambahan ilmu pengetahuan dan wawasan baru yang didapatkan peserta dianggap bermafaat bagi mereka dan Sebagian dapat diaplikasikan ditempat kerja. Perubahan prilaku peserta diklat yang diukur berdasarkan rencana tindak atau <i>action plan</i> yang dapat diimplementasikan diintainya. Seperti ada perubahan dalam hal disiplin kerja meningkat, pola kerja struktur, penyelesaian pekerja lebih cepat, sistematis dan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tupoksinya.